

Diduga Lecehkan Siswinya, Oknum Guru SDN di Kota Bogor Dirumahkan

BOGOR (IM) - Oknum guru yang diduga lecehkan siswi SD Negeri Pengadilan 2, Kota Bogor telah dirumahkan.

Oknum tersebut tidak diperkenankan ke sekolah sampai batas waktu yang belum ditentukan.

"Iya (oknum guru), dirumahkan dulu. Ibu gak bisa berhentiin karena bukan wewenang ibu," kata Kepala Sekolah SD Negeri Pengadilan 2, Ida Widiawati saat ditemui wartawan, Selasa (12/9).

Tindakan tersebut langsung dilakukan setelah pihak sekolah mendapat aduan dari orangtua siswi terkait dugaan pelecehan pada 8 September 2023.

"Anak ke orang tua, orang tua ke sekolah. Langsung hari itu juga ibu membuat surat ke Disdik," jelasnya.

Saat ini, pihak sekolah juga telah menyerahkan dugaan kasus tersebut ke-

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) UPTD PPA Kota Bogor.

Yang pasti, pihak sekolah berharap agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Karena mereka sudah mengumpulkan data, jadi laporan dari orang tua langsung ke sana," tutupnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kopol Rizka Fadila membenarkan adanya laporan terkait dugaan pelecehan oleh oknum guru tersebut.

"Laporan sudah kami terima, sedang tindaklanjuti," kata Rizka dikonfirmasi.

Belum diketahui pasti kronologi dugaan pelecehan tersebut. Saat ini, pihaknya masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut dengan melakukan pemeriksaan pihak-pihak yang terkait.

"Mohon waktu," pengkasnya • **gio**

Soal Isu Pungutan di SMKN 1 Depok, Bey: Kami Cek Dulu Detailnya

BANDUNG (IM) - Sejumlah orang tua siswa SMK Negeri 1 Depok mengeluh adanya pungutan sumbangan sebesar Rp 2,8 juta yang diminta oleh pihak sekolah. Sumbangan itu disebut akan digunakan untuk menutupi dana kebutuhan operasional mencapai Rp 4 miliar yang tidak ditanggung oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pihak sekolah pun berdalih, isu pungutan sebesar Rp 2,8 juta kepada siswa adalah miskomunikasi. Pasalnya sekolah tidak mematok besaran uang sumbangan kepada orang tua siswa. Terkait hal itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin mengaku belum mengetahui adanya pungutan yang diminta oleh SMK Negeri 1 Depok kepada orangtua siswa.

"Belum update ya," katanya saat ditemui di kantor Kejati Jabar, Jalan L. R. E Martadinata, Kota Bandung, Selasa (12/9). Lebih lanjut, dia akan mengecek terlebih dahulu detail infor-

masi pungutan sumbangan Rp 2,8 juta yang dibebankan sekolah ke setiap siswa. Bey pun belum bisa memastikan apakah pungutan sumbangan yang diminta oleh pihak sekolah itu melanggar aturan atau tidak.

"Ya kan harus kita cek dulu SMK negeri atau swasta kesepakatannya gimana kita harus tahu dulu lebih detail belum saya update," ucap Bey.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Jabar nomor 44 tahun 2022 pada Pasal 12 huruf b menyebutkan, pihak sekolah negeri dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua atau walinya. Namun demikian pada Pasal 15 ayat 3 penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya yang bersumber dari orangtua harus dilakukan melalui musyawarah antara Komite Sekolah.

"Itu harus kita perhatikan juga apakah peraturan awalnya gimana, mungkin kalau memang negeri itu kan harusnya gratis," terang Bey. • **yan**

Pemprov Jawa Barat Usulkan APBD Perubahan 2023 Sebesar Rp37,74 Triliun

BANDUNG (IM) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37,74 triliun atau naik Rp2 triliun lebih dari target APBD 2023.

"Pada rancangan perubahan ini, volume APBD semula Rp35,02 triliun ditargetkan naik 7,77 persen menjadi Rp37,74 triliun," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin di Bandung, Jabar, Selasa (12/9).

Bey mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pada Senin (11/9) malam yang membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Saat itu, diungkapkan juga bahwa pihak eksekutif menilai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat kondisi yang menuntut perlunya dilakukan perubahan anggaran.

Bey menjelaskan bahwa kondisi-kondisi itu antara lain, berdasarkan laporan realisasi pendapatan daerah sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp16,55 triliun atau 48,48 persen dari target pendapatan sebesar Rp34,15 triliun.

Karena itu, rencana perubahan pendapatan daerah perubahan APBD 2023 ditargetkan sebesar Rp35,27 triliun, bertambah Rp1,13 triliun atau naik 3,30 persen terhadap penetapan APBD 2023 sebesar Rp34,15 triliun.

"Dengan rincian

pendapatan asli daerah (PAD) semula Rp23,69 triliun bertambah Rp1,11 triliun atau naik 4,68 persen menjadi Rp24,80 triliun. Kemudian, pendapatan transfer semula Rp10,43 triliun berkurang Rp59,44 miliar atau turun 0,57 persen menjadi Rp10,37 triliun," ucap dia.

Sementara, lain-lain pendapatan daerah yang sah semula Rp28,80 miliar, bertambah 77,78 miliar atau naik 279,09 persen menjadi Rp106,57 miliar.

Untuk kebijakan belanja pada rencana perubahan APBD 2023, Bey menjelaskan terdiri dari pemenuhan belanja wajib dan mengikat, penyediaan alokasi gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPJK), juga pendanaan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, serta memperhatikan realisasi semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, tutur Bey, belanja daerah pada perubahan APBD 2023 diasumsikan mengalami peningkatan.

"Semula Rp33,39 triliun bertambah Rp2,42 triliun atau naik 7,13 persen menjadi Rp36,35 triliun," ucapnya.

Sementara itu, dari sisi kebijakan pembiayaan, penerimaan pembiayaan semula Rp873,28 miliar, bertambah Rp1,59 triliun atau naik 182,31 persen menjadi Rp2,47 triliun.

Pengeluaran pembiayaan semula Rp1,09 triliun, bertambah Rp300 miliar atau naik 27,58 persen menjadi Rp1,39 triliun. • **pra**

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



SUNGAI CILEUNGSI TERCEMAR LIMBAH INDUSTRI

ikan sapu-sapu (*Pterygoplichthys pardalis*) mati di pinggir Sungai Cileungsi yang airnya hitam tercemar limbah di kawasan Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/9). Menurut Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) pencemaran Sungai Cileungsi sudah berlangsung lebih dari tujuh tahun, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini ternyata tidak efektif karena pencemaran yang diduga dari limbah industri selalu terjadi dan berulang.

Kelanjutan Pembangunan RSUD Parung Bakal Ditanggung APBD Kabupaten Bogor

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Mike Kartalina Suwardi menuturkan bahwa penggunaan APBD dalam kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung merupakan solusi, apalagi jajarannya tidak mengajukan Banku serupa ke Kementerian Kesehatan.

CIBINONG (IM) - Setelah permohonan bantuan keuangan (Banku) ditolak oleh Pemprov Jawa Barat, akhirnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor memasukkan anggaran kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung di Anggaran

pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

"Kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung akan kami masukkan dalam APBD Kabupaten Bogor di Tahun 2024 mendatang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor,

Mike Kartalina Suwardi kepada wartawan, Selasa (12/9).

Mike Kartalina Suwardi menuturkan bahwa penggunaan APBD dalam kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung merupakan solusi, apalagi jajarannya tidak mengajukan Banku serupa ke Kementerian Kesehatan.

"Kalau pengajuan bantuan ke Kementerian Kesehatan lebih ke alat-alat kesehatan, hingga APBD ini menjadi solusi pembiayaan kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung," tutur Mike Kartalina Suwardi.

Sebelumnya, Legislator DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya mengungkapkan bahwa permohonan Banku ke Pemprov Jawa Barat se-

sar Rp 206 miliar untuk kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung ditolak.

Asep Wahyuwijaya pun mengkritisi kebijakan Pemkab Bogor dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tersebut.

"Pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Bogor merupakan kebutuhan dasar, hingga harusnya tidak mengandalkan Banku dari Pemprov Jawa Barat dan mengandalkan dari APBD Kabupaten Bogor seperti yang dilakukan oleh Bupati Karawang Cella Nurrachadian," ungkap Asep

Wahyuwijaya.

Asep Wahyuwijaya menjelaskan bahwa harusnya APBD Kabupaten Bogor dirasionalisasi, dimana kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas Pemkab Bogor.

"Ini tentang manajemen kelola keuangan daerah, mana yang masuk ke dalam kewenangan Pemkab Bogor dan mana yang merupakan kewenangan pemerintah desa atau mana yang kebutuhan dasar dan yang bukan. Saya yakin, dengan besarnya APBD dan dilakukan beberapa langkah efisiensi, Pemkab Bogor sanggup membiayai secara mandiri pembangunan RSUD di Desa Cogrek, Parung tersebut," jelasnya. • **gio**

Pimpinan DPRD Sampaikan Aspirasi ke Pj Gubernur Jabar

BOGOR (IM) - Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan aspirasi dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor terkait dengan kondisi saat ini di Kota Bogor kepada penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.

Aspirasi yang disampaikan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto adalah isu PPDB yang kemarin sempat menghangat di Kota Bogor, menunjukkan kebutuhan sekolah negeri mulai dari tingkat SMA dan SMP di Kota Bogor harus menjadi atensi.

"Sehingga, diharapkan Pj Gubernur bisa membantu pembangunan unit sekolah baru di Kota Bogor dengan menggunakan Bantuan Keuangan (Banku) Provinsi Jawa Barat," ungkap Atang dalam keterangan tertulis

pada Selasa (12/9). Atang melanjutkan, nantinya, jika banku diberikan, maka DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor akan menyediakan lahan yang tepat untuk dibangun unit sekolah baru.

"Kami berharap ini bisa dibantu oleh provinsi Jabar. Insha Allah pak wali akan menyiapkan lahannya dan kami di DPRD Kota Bogor akan membantu hal lainnya, mudah-mudahan kota Bogor ini kedepan akan terus bisa melahirkan para pemimpin terbaik karena pendidikan yang layak," tutur Atang.

Atang juga menyampaikan harapannya kepada Pj Gubernur Jabar, agar bantuan untuk covering BPJS-PBI dari Provinsi Jawa Barat bisa ditingkatkan di tahun depan. Sebab, berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan

(Dinkes) Kota Bogor, saat ini peserta BPJS Kesehatan di Kota Bogor hampir mencapai 100 persen.

"Memang kurang sedikit lagi yang belum dan kalau seandainya kemampuan APBD Jawa Barat yang mencapai Rp50 triliun barangkali bisa membantu covering di Kota Bogor sampai 100 persen karena ini bantuan BPJS PBI ini sangat dibutuhkan oleh warga di Kota Bogor," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata menyampaikan

aspirasinya terkait bantuan untuk penanganan bencana. Untuk diketahui di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, tahun lalu banyak terjadi bencana tanah longsor yang merusak rumah warga.

Dadang sebagai wakil

rakyat dari dapil Bogor Selatan, meminta kepada Pj Gubernur Jabar, agar bantuan untuk penanganan dan pasca bencana bisa disalurkan kepada warga.

Lalu, Ketua Fraksi PKS, sekaligus anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menyampaikan, aspirasi berupa permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan lintasan tidak sebidang di pintu kereta Kebon Pedes. Wacana pembangunan itu, menurut Karnain sudah diajukan sejak bertahun-tahun silam. Guna meminimalisir terjadinya kecelakaan dan kemacetan maka ia berharap APBD Jabar bisa dialokasikan untuk pembangunan lintasan tidak sebidang.

Terakhir, anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi menyampaikan aspirasi mengenai dana hibah

untuk pesantren yang sampai saat ini belum juga terealisasi. Ia menjelaskan bahwa di Kota Bogor sendiri sudah ada Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren. Namun, realisasinya belum juga terwujud. Ahmad pun berharap dengan program Pj Gubernur Jabar yang sejalan dengan Pemkot Bogor terkait bantuan untuk pondok pesantren bisa terealisasi di tahun depan.

Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin menyampaikan terkait dengan infrastruktur pendidikan, ia ingin mendalami terlebih dahulu terkait keuangan daerah. Sebab, keinginan ini juga disampaikan oleh daerah lainnya di Jawa Barat. Sehingga ia perlu melakukan pemetaan terkait prioritas bantuan yang akan diberikan. • **jay**

Komisi V DPRD Jabar Dorong Percepatan Pembangunan SMAN di Kecamatan Ciater

BANDUNG (IM) - Komisi V DPRD Jawa Barat memberikan beberapa rekomendasi terkait pembangunan SMAN Ciater yang diminta Panitia Perintis SMA Negeri Ciater. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Panitia Perintis SMA Negeri Ciater.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menuturkan, rekomendasi Komisi V DPRD Jawa Barat atas pembangunan SMAN Ciater di antaranya; pertama untuk jangka pendek yakni perbaikan sistem zonasi dengan memperhatikan kondisi lokal, kearifan lokal, dan memperhitungkan blank zonasi.

Kalau yang blank zonasi ini lebih dari satu kecamatan. Maka jatah dari zonasinya dialokasikan bukan dihitung dari satu titik, tapi dari beberapa titik kecamatan yang ada.

Misalkan ada 200 calon siswa dibagi ke beberapa kecamatan, dan ini harus dipakainya oleh para stakeholder di sana. Perubahan sistem zonasi ini untuk menyelesaikan sebagian kecil permasalahan yang ada, tutur Abdul Hadi Wijaya, Bandung,



Senin (11/9).

Kedua, Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jabar mengupayakan pembangunan SMAN Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Mengingat pembangunan SMAN Ciater menjadi aspirasi masyarakat Kecamatan Ciater yang sudah lama disampaikan, dan sangat ditunggu.

Ketiga, rekomendasi jangka panjang dengan menambah anggaran untuk sektor pendidikan khususnya untuk anggaran pembangunan unit sekolah baru (USB), termasuk percepatan pembangunannya.

"Penambahan anggaran pendidikan tidaklah mudah, kita harus sama-sama duduk. Seluruh pihak terkait harus duduk bersama membahas hal ini. Bicara anggaran pendidikan tak hanya soal anggaran membangun sekolah, tapi masih banyak hal lainnya, tapi ini adalah demi masa depan anak-anak," kata Abdul Hadi Wijaya.

Keempat, Komisi V DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengkaji kembali alokasi anggaran termasuk target serta daftar wilayah yang masuk prioritas pembangunan unit sekolah baru. "Kami meminta Pemprov

Jabar melakukan proses hitung ulang alokasi anggaran, jumlah unit sekolah baru yang akan dibangun, target pembangunan karena membangun unit sekolah baru membutuhkan anggaran yang luar biasa banyak," ucap dia.

Siap Mengawal

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Jawa Barat daerah pemilihan (Dapil) 11 Kabupaten Subang, Sumedanga dan Kabupaten Majalengka Raden Tedi mengaskan, DPRD Jawa Barat termasuk Komisi V siap mengawal permintaan pembangunan SMAN Ciater, Kecamatan Ciater, Ka-

bupaten Subang sampai terealisasi.

Mengingat pembangunan SMAN Ciater menjadi aspirasi masyarakat Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang yang sudah lama dan terus disampaikan selama seles.

"Kami sudah mendenyakan aspirasi dari Panitia Perintis SMA Negeri Ciater. Memang betul apa yang disampaikan Panitia Perintis SMA Negeri Ciater, permintaan pembangunan SMAN Ciater ini ditunggu masyarakat," tegas Raden Tedi.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Enjang Tedi dan Sari Sundari yang mendorong percepatan pembangunan unit sekolah baru di Jabar, salah satunya di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang.

"Kami mendukung untuk pembangunan unit sekolah baru, dan kami setuju dengan pembangunan unit sekolah baru di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang," tambah Enjang Tedi dan Sari Sundari. • **lys**